



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
- c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;
- d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- e. Pelayanan Pendaftaran Tanah;
- f. Pelayanan Informasi Pertanahan;
- g. Pelayanan Lisensi;
- h. Pelayanan Pendidikan;
- i. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965; dan
- j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas, yang meliputi:
  1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;
  2. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal;
  3. Pelayanan Pengembalian Batas; dan
  4. Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.
- c. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan.

## Pasal 3

Tarif Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 4

(1) Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1, dihitung berdasarkan rumus:

a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar

$$T_u = \left( \frac{L}{500} \times HSBK_u \right) + \text{Rp}100.000,00$$

b. Luas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

$$T_u = \left( \frac{L}{4.000} \times HSBK_u \right) + Rp14.000.000,00$$

- c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

$$T_u = \left( \frac{L}{10.000} \times HSBK_u \right) + Rp134.000.000,00$$

- (2) Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif Pelayanan Pengembalian Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 adalah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4 adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 6

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, meliputi:

- a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B;
- c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah; dan
- d. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.

#### Pasal 7

- (1) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pa} = \left( \frac{L}{500} \times HSBK_{pa} \right) + Rp350.000,00$$

- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk pemeriksaan tanah secara massal, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pam} = \frac{1}{5} \times \left( \frac{L}{500} \times HSBK_{pa} \right) + Rp350.000,00$$

#### Pasal 8

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pb} = \left( \frac{L}{100.000} \times HSBK_{pb} \right) + Rp 5.000.000,00$$

Pasal 9 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pp} = \left( \frac{L}{500} \times HSBK_{pp} \right) + Rp350.000,00$$

- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pm} = \frac{1}{5} \times \left( \frac{L}{500} \times HSBK_{pm} \right) + Rp350.000,00$$

#### Pasal 10

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstataasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

#### Pasal 11

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, meliputi:

- a. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian;
- b. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 12

- (1) Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{kts} = \frac{L + 500}{0,020} + (3T_u \times \frac{3}{4}) + T_{ph}$$

- (2) Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{kts} = \frac{L + 500}{0,004} + (3T_u \times \frac{3}{4}) + T_{ph}$$

#### Pasal 13

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, meliputi:

- a. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi;
- b. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi; dan
- c. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

#### Pasal 14

- (1) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{ptil} = \left( \frac{L}{100.000} \times HSBK_{pb} \right) + Rp5.000.000,00$$

(2) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{\text{ptip}} = \left( \frac{L}{500} \times \text{HSBK}_{\text{pa}} \right) + \text{Rp}350.000,00$$

#### Pasal 15

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e meliputi:

- a. Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali; dan
- b. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

#### Pasal 16

- (1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran:
- a. Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dan
  - b. Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu;
- dihitung berdasarkan rumus  $T = (2\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp}100.000,00$

(2) Tarif . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus  $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp } 50.000,00$

#### Pasal 17

- (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan huruf h adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 16.

#### Pasal 18

Tarif Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tanah.

#### Pasal 19

Tarif Pelayanan di Bidang Pertanahan yang berasal dari Kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen kerjasama.

#### Pasal 20

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d, huruf h, dan huruf i tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

(2) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 21

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. masyarakat tidak mampu;
  - b. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
  - c. veteran, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. suami/istri veteran, suami/istri pegawai negeri sipil, suami/istri prajurit Tentara Nasional Indonesia, suami/istri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. janda/duda veteran, janda/duda pegawai negeri sipil, janda/duda prajurit Tentara Nasional Indonesia, janda/duda anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

g. janda/duda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

g. janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil, janda/duda purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 22

- (1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah Wakaf ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah dari Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Penggantian Nazhir ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- masyarakat tidak mampu;
  - instansi Pemerintah;
  - badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo.

(3) Terhadap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (4) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. veteran;
  - b. suami/istri veteran, suami/istri Pegawai Negeri Sipil, suami/istri prajurit Tentara Nasional Indonesia, suami/istri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. pensiunan Pegawai Negeri Sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. janda/duda veteran, janda/duda Pegawai Negeri Sipil, janda/duda prajurit Tentara Nasional Indonesia, janda/duda anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
  - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(7) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 24

- (1) Terhadap instansi Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari:
  - a. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
  - b. Pelayanan Informasi Pertanahan; dan
  - c. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 25

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional mempunyai tarif dalam satuan rupiah dan persentase.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

#### Pasal 26

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, Perpanjangan Hak Atas Tanah, atau Pembaruan Hak Atas Tanah, yang belum ditetapkan keputusannya, dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini;
- b. permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, Perpanjangan Hak Atas Tanah, atau Pembaruan Hak Atas Tanah yang telah diterbitkan keputusannya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dikenakan kewajiban membayar uang pemasukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2010  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

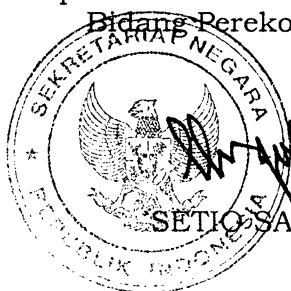
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 18

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,



SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2010  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional serta penyederhanaan dalam penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas” adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah atau kegiatan pertanahan lainnya.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Secara Massal” adalah permohonan yang diajukan paling sedikit 10 (sepuluh) bidang dalam 1 (satu) kelurahan, desa, atau nama lainnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi” adalah legalisasi gambar ukur hasil pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dilakukan oleh surveyor berlisensi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan” adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dalam rangka penetapan batas ruang atas tanah, atau ruang bawah tanah untuk penerbitan sertifikatnya atau kegiatan pertanahan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

”hektar” adalah luas sama dengan 10.000 m<sup>2</sup>.

”T<sub>u</sub>” adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas.

”L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m<sup>2</sup>).

”HSBK<sub>u</sub>” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan.

Contoh:

HSBK<sub>u</sub> untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah:

a) luas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

a) luas tanah sampai dengan 10 hektar

1) luas tanah 300 m<sup>2</sup>

$$T_u = \left( \frac{300}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}48.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$
$$= \text{Rp}148.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp148.000,00

2) luas tanah 5.000 m<sup>2</sup>

$$T_u = \left( \frac{5.000}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}800.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$
$$= \text{Rp}900.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp900.000,00

3) luas tanah 75.000 m<sup>2</sup> (7,5 hektar)

$$T_u = \left( \frac{75.000}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}12.000.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$
$$= \text{Rp}12.100.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp12.100.000,00

b) luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

1) luas tanah 200.000 m<sup>2</sup> (20 hektar)

$$T_u = \left( \frac{200.000}{4.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}14.000.000,00$$

$$= \text{Rp}4.000.000,00 + \text{Rp}14.000.000,00$$
$$= \text{Rp}18.000.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp18.000.000,00

2) luas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2) luas tanah 9.000.000 m<sup>2</sup> (900 hektar)

$$\begin{aligned} T_u &= \left( \frac{9.000.000}{4.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}14.000.000,00 \\ &= \text{Rp}180.000.000,00 + \text{Rp}14.000.000,00 \\ &= \text{Rp}194.000.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp194.000.000,00

c) luas tanah lebih dari 1.000 hektar

1) luas tanah 20.000.000 m<sup>2</sup> (2.000 hektar)

$$\begin{aligned} T_u &= \left( \frac{20.000.000}{10.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}134.000.000,00 \\ &= \text{Rp}160.000.000,00 + \text{Rp}134.000.000,00 \\ &= \text{Rp}294.000.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp294.000.000,00

2) luas tanah 150.000.000 m<sup>2</sup> (15.000 hektar)

$$\begin{aligned} T_u &= \left( \frac{150.000.000}{10.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}134.000.000,00 \\ &= \text{Rp}1.200.000.000,00 + \text{Rp}134.000.000,00 \\ &= \text{Rp}1.334.000.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 1.334.000.000,00

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

“T<sub>um</sub>” adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Massal.

Contoh:

HSBK<sub>u</sub> untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah secara massal:

luas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

luas tanah 300 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} T_u &= \left( \frac{300}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}48.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}148.000,00 \end{aligned}$$

dikenakan tarif 75% dari  $T_u$ , maka:

$$\begin{aligned} T_{um} &= 75\% \times \text{Rp}148.000,00 \\ &= \text{Rp}111.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp111.000,00

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

“ $T_{pb}$ ” adalah Tarif Pelayanan Pengembalian Batas

Contoh:

HSBK<sub>u</sub> untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pengembalian Batas:

luas tanah 300 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} T_u &= \left( \frac{300}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}48.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}148.000,00 \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 150% dari  $T_u$ , maka:

$$\begin{aligned} T_{pb} &= 150\% \times \text{Rp}148.000,00 \\ &= \text{Rp}222.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp222.000,00

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan:

“ $T_{sl}$ ” adalah Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.

Contoh: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Contoh:

HSBK<sub>u</sub> untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi:

luas tanah 300 m<sup>2</sup>

$$T_u = \left( \frac{300}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}48.000,00 + \text{Rp}100.000,00$$
$$= \text{Rp}148.000,00$$

Dikenakan tarif 30% dari Tu, maka:

$$T_{sl} = 30\% \times \text{Rp}148.000,00$$
$$= \text{Rp}44.400,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp44.400,00.

#### Pasal 5

Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan dilaksanakan secara 3 (tiga) dimensi, dengan perhitungan panjang, lebar, dan tinggi berupa ruang dengan menggunakan metode, teknologi, waktu, penyimpanan data, dan penyajian yang lebih khusus.

#### Pasal 6

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Panitia B" adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Usaha.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tim Peneliti Tanah” adalah tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Petugas Konstataasi” adalah petugas (Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk) yang melaksanakan pemeriksaan data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan perpanjangan serta pembaruan Hak Atas Tanah kecuali Hak Guna Usaha.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“ $T_{pa}$ ” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi ( $m^2$ ).

“ $HSBK_{pa}$ ” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

$HSBK_{pa}$  untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A:

a) luas tanah  $300 m^2$

$$T_{pa} = \left( \frac{300}{500} \times Rp67.000,00 \right) + Rp350.000,00$$

$$= Rp40.200,00 + Rp350.000,00$$

$$= Rp390.200,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00

b) luas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

b) luas tanah 5.000 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} T_{pa} &= \left( \frac{5.000}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}670.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}1.020.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00

c) luas tanah 75.000 m<sup>2</sup> (7,5 hektar)

$$\begin{aligned} T_{pa} &= \left( \frac{75.000}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.050.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.400.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

“T<sub>pam</sub>” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.

Contoh:

HSBK<sub>pa</sub> untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah secara massal:

luas tanah 300 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} T_{pam} &= \frac{1}{5} \times \left( \frac{300}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \frac{1}{5} \times \text{Rp}40.200,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}8.040,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}358.040,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp358.040,00.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### Pasal 8

Yang dimaksud dengan:

“T<sub>pb</sub>” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m<sup>2</sup>).

“HSBK<sub>pb</sub>” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBK<sub>pb</sub> untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B:

a) luas tanah 200.000 m<sup>2</sup> (20 hektar)

$$\begin{aligned} T_{pb} &= \left( \frac{200.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}134.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}5.134.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp5.134.000,00

b) luas tanah 50.000.000 m<sup>2</sup> (5.000 hektar)

$$\begin{aligned} T_{pb} &= \left( \frac{50.000.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}33.500.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}38.500.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp38.500.000,00.

c) luas tanah 150.000.000 m<sup>2</sup> (15.000 hektar)

$$\begin{aligned} T_{pb} &= \left( \frac{150.000.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}100.500.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}105.500.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp105.500.000,00.

Pasal 9 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“ $T_{pp}$ ” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah.

“ $L$ ” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi ( $m^2$ ).

“ $HSBK_{pp}$ ” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

$HSBK_{pp}$  untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah:

1) luas tanah 300  $m^2$

$$\begin{aligned} T_{pp} &= \left( \frac{300}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}40.200,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}390.200,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00.

2) luas tanah 5.000  $m^2$

$$\begin{aligned} T_p &= \left( \frac{5.000}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}670.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}1.020.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00.

3) luas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3) luas tanah 75.000 m<sup>2</sup> (7,5 hektar)

$$\begin{aligned} T_p &= \left( \frac{75.000}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.050.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.400.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

“T<sub>pm</sub>” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m<sup>2</sup>).

“HSBK<sub>pm</sub>” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBK<sub>pm</sub> untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal:

luas tanah 300 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} T_{pm} &= \frac{1}{5} \times \left( \frac{300}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \frac{1}{5} \times \text{Rp}40.200,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}8.040,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}358.040,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp358.040,00

Pasal 10

Yang dimaksud dengan:

“T<sub>pk</sub>” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.

”L” adalah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m<sup>2</sup>).

“HSBK<sub>pk</sub>” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstataasi untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBK<sub>pk</sub> untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstataasi:

a) luas tanah 300 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} T_{pa} &= \left( \frac{300}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}40.200,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}390.200,00 \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 50% dari T<sub>pa</sub>, maka:

$$\begin{aligned} T_{pk} &= 50\% \times \text{Rp}390.200,00 \\ &= \text{Rp}195.100,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp195.100,00.

b) luas tanah 5.000 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} T_{pa} &= \left( \frac{5.000}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}670.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}1.020.000,00 \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 50% dari T<sub>pa</sub>, maka:

$$\begin{aligned} T_{pk} &= 50\% \times \text{Rp} 1.020.000,00 \\ &= \text{Rp}510.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp510.000,00.

c) luas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

c) luas tanah 75.000 m<sup>2</sup> (7,5 hektar)

$$\begin{aligned} T_{pa} &= \left( \frac{75.000}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.050.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.400.000,00 \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 50% dari  $T_{pa}$ , maka:

$$\begin{aligned} T_{pk} &= 50\% \times \text{Rp}10.400.000,00 \\ &= \text{Rp} 5.200.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.200.000,00.

#### Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Konsolidasi Tanah” adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

#### Pasal 12

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“ $T_{kts}$ ” adalah Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m<sup>2</sup>).

“ $T_u$ ” adalah Tarif Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah yang digunakan untuk:

- a. pengukuran dan pemetaan keliling;
- b. pengukuran Topografi;
- c. pengukuran dan pemetaan Rincikan;
- d. pemindahan desain ke lapang.

“ $T_{ph}$ ” adalah Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

“HSBK<sub>u</sub>” . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

“HSBK<sub>u</sub>” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan.

Contoh:

Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian:

Tuan A, Tuan B, dan Tuan C sepakat untuk menata tanah pertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya pertanian. Luas tanah Tuan A, Tuan B, dan Tuan C masing-masing adalah 1.000 m<sup>2</sup>, 2.000 m<sup>2</sup>, dan 3.000 m<sup>2</sup>.

HSBK<sub>u</sub> adalah sebesar Rp80.000,00.

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini sebesar Rp50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing bidang adalah:

a) bidang tanah Tuan A

1) menghitung T<sub>u</sub> untuk bidang tanah Tuan A

$$\begin{aligned} T_u &= \left( \frac{1.000}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}160.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}260.000,00. \end{aligned}$$

2) memasukkan variabel T<sub>u</sub> dalam rumus T<sub>kts</sub>

$$\begin{aligned} T_{kts} &= \left( \frac{1.000 + 500}{0,020} \right) + (3 \times \text{Rp}260.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}75.000 + \text{Rp}585.000,00 + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}710.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan A sebesar Rp710.000,00.

b) bidang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

b) bidang tanah Tuan B

1) menghitung  $T_u$  untuk bidang tanah Tuan B

$$T_u = \left( \frac{2.000}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}320.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ = \text{Rp}420.000,00.$$

2) memasukkan variabel  $T_u$  dalam rumus  $T_{kts}$

$$T_{kts} = \left( \frac{2.000 + 500}{0,020} \right) + (3 \times \text{Rp}420.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00$$

$$= \text{Rp}125.000 + \text{Rp}945.000,00 + \text{Rp}50.000,00 \\ = \text{Rp}1.120.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan B sebesar Rp1.120.000,00.

c) bidang tanah Tuan C

1) menghitung  $T_u$  untuk bidang tanah Tuan C

$$T_u = \left( \frac{3.000}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00$$

$$= \text{Rp}480.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ = \text{Rp}580.000,00$$

2) memasukkan variabel  $T_u$  dalam rumus  $T_{kts}$

$$T_{kts} = \left( \frac{3.000 + 500}{0,020} \right) + (3 \times \text{Rp}580.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00$$

$$= \text{Rp}175.000 + \text{Rp}1.305.000,00 + \text{Rp}50.000,00 \\ = \text{Rp}1.530.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan C sebesar Rp1.530.000,00.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (2)

Contoh:

Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian:

Tuan D, Tuan E, dan Tuan F sepakat untuk menata tanah nonpertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya nonpertanian. Luas tanah Tuan D, Tuan E, dan Tuan F masing-masing adalah 500 m<sup>2</sup>, 600 m<sup>2</sup>, dan 700 m<sup>2</sup>.

HSBK<sub>u</sub> adalah sebesar Rp80.000,00.

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini sebesar Rp50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing bidang adalah:

a) bidang tanah Tuan D

1) menghitung T<sub>u</sub> untuk bidang tanah Tuan D

$$\begin{aligned} T_u &= \left( \frac{500}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}80.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}180.000,00 \end{aligned}$$

2) memasukkan variabel T<sub>u</sub> dalam rumus T<sub>kts</sub>

$$\begin{aligned} T_{kts} &= \left( \frac{500 + 500}{0,004} \right) + (3 \times \text{Rp}180.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}250.000,00 + \text{Rp}405.000,00 + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}705.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan D sebesar Rp705.000,00.

b) bidang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

b) bidang tanah Tuan E

- 1) menghitung  $T_u$  untuk bidang tanah Tuan E

$$\begin{aligned} T_u &= \left( \frac{600}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}96.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}196.000,00 \end{aligned}$$

- 2) memasukkan variabel  $T_u$  dalam rumus  $T_{kts}$

$$\begin{aligned} T_{kts} &= \left( \frac{600 + 500}{0,004} \right) + (3 \times \text{Rp}196.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}275.000,00 + \text{Rp}441.000,00 + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}766.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan E sebesar Rp766.000,00.

c) bidang tanah Tuan F

- 1) menghitung  $T_u$  untuk bidang tanah Tuan F

$$\begin{aligned} T_u &= \left( \frac{700}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}112.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}212.000,00 \end{aligned}$$

- 2) memasukkan variabel  $T_u$  dalam rumus  $T_{kts}$

$$\begin{aligned} T_{kts} &= \left( \frac{700 + 500}{0,004} \right) + (3 \times \text{Rp}212.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}300.000,00 + \text{Rp}477.000,00 + \text{Rp}50.000,00 \\ &= \text{Rp}827.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan F sebesar Rp827.000,00.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Pertimbangan Teknis Pertanahan” adalah ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah.

Pasal 14 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“ $T_{ptil}$ ” adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi ( $m^2$ ).

“ $HSBK_{pb}$ ” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

$HSBK_{pb}$  untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis dalam rangka Izin Lokasi:

a) luas tanah 200.000  $m^2$  (20 hektar)

$$\begin{aligned} T_{ptil} &= \left( \frac{200.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}134.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}5.134.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.134.000,00.

b) luas tanah 50.000.000  $m^2$  (5.000 hektar)

$$\begin{aligned} T_{ptil} &= \left( \frac{50.000.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}33.500.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}38.500.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp38.500.000,00.

c) luas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

c) luas tanah 150.000.000 m<sup>2</sup> (15.000 hektar)

$$\begin{aligned} T_{ptil} &= \left( \frac{150.000.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}100.500.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}105.500.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp105.500.000,00.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

“T<sub>ptpl</sub>” adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m<sup>2</sup>).

“HSBK<sub>pb</sub>” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBK<sub>pb</sub> untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi:

a) luas tanah 200.000 m<sup>2</sup> (20 hektar)

$$\begin{aligned} T_{ptil} &= \left( \frac{200.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}134.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}5.134.000,00 \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 50% dari T<sub>ptil</sub>, maka:

$$\begin{aligned} T_{ptpl} &= 50\% \times \text{Rp} 5.134.000,00 \\ &= \text{Rp} 2.567.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp2.567.000,00.

b) luas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

b) luas tanah 50.000.000 m<sup>2</sup> (5.000 hektar)

$$\begin{aligned} T_{ptil} &= \left( \frac{50.000.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}33.500.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}38.500.000,00 \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 50% dari  $T_{ptil}$ , maka:

$$\begin{aligned} T_{ptpl} &= 50\% \times \text{Rp}38.500.000,00 \\ &= \text{Rp}19.250.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp19.250.000,00.

c) luas tanah 150.000.000 m<sup>2</sup> (15.000 hektar)

$$\begin{aligned} T_{ptil} &= \left( \frac{150.000.000}{100.000} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}100.500.000,00 + \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}105.500.000,00 \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 50% dari  $T_{ptil}$ , maka:

$$\begin{aligned} T_{ptpl} &= 50\% \times \text{Rp}105.500.000,00 \\ &= \text{Rp}52.750.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp52.750.000,00.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

“ $T_{ptip}$ ” adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah. “L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m<sup>2</sup>).

“ $HSBK_{pa}$ ” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Contoh:

HSBK<sub>pa</sub> untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah:

a) luas tanah 300 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} T_{\text{ptip}} &= \left( \frac{300}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}40.200,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}390.200,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00

b) luas tanah 5.000 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} T_{\text{ptip}} &= \left( \frac{5.000}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}670.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}1.020.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00.

c) luas tanah 75.000 m<sup>2</sup> (7,5 hektar)

$$\begin{aligned} T_{\text{ptip}} &= \left( \frac{75.000}{500} \times \text{Rp}67.000,00 \right) + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.050.000,00 + \text{Rp}350.000,00 \\ &= \text{Rp}10.400.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali” adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi kemudian.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai tanah” adalah nilai pasar (*market value*) yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan.

Contoh:

Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m<sup>2</sup>) adalah Rp100.000,00.

Luas Tanah adalah 100 m<sup>2</sup>.

Jadi nilai tanah dihitung menjadi:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 100 = \text{Rp}10.000.000,00.$$

Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu menjadi:

$$\begin{aligned} T &= 2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}20.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}120.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp120.000,00.

Ayat (2)

Contoh:

Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m<sup>2</sup>) adalah Rp100.000,00.

Luas Tanah adalah 100 m<sup>2</sup>.

Jadi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Jadi nilai tanah dihitung menjadi:

= Rp100.000,00 x 100

= Rp10.000.000,00

Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum menjadi:

$T = 1\% \times \text{Rp}10.000.000,00 + \text{Rp}50.000,00$

= Rp10.000,00 + Rp50.000,00

= Rp60.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp60.000,00.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)” adalah semua tanah milik perorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960.

Yang dimaksud dengan “Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965” adalah semua tanah kepunyaan Badan-badan Hukum Belanda yang Direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “masyarakat tidak mampu” adalah perorangan yang besar penghasilannya per bulan dibawah Upah Minimum yang berlaku pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT/RW setempat dan diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nazhir” adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5100





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2010  
TANGGAL 22 JANUARI 2010

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	<b>PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN BATAS KAWASAN ATAU BATAS WILAYAH, DAN PEMETAAN</b>		
	A. Pelayanan Survei		
	1. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Pemukiman atau Pertanian	Per bidang	Rp 450.000,00
	2. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Usaha	Per bidang	Rp 600.000,00
	B. Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah	Per tugu	Rp 3.500.000,00
	C. Pelayanan Pemetaan		
	1. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1:10.000	Per hektar	Rp 25.000,00
	2. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1:25.000	Per hektar	Rp 5.000,00
	3. Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	Per bidang	Rp 75.000,00
	4. Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	Per bidang	Rp 75.000,00
	5. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	Per hektar	Rp 40.000,00
	6. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1 : 25.000	Per hektar	Rp 20.000,00

D. Pelayanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	D. Pelayanan Pembuatan Peta Dasar		
	1. Pembuatan Peta Foto Skala 1:1.000 (minimal 1.000 hektar)	Per hektar	Rp 200.000,00
	2. Penambahan Pembuatan Peta Foto Skala 1:1.000 seluas 500 Hektar dan kelipatannya	Per hektar	Rp 150.000,00
	3. Pembuatan Peta Citra Skala 1:2.500 (minimal 10.000 hektar)	Per hektar	Rp 50.000,00
	4. Pembuatan Peta Garis Skala 1:1.000 (minimal 100 hektar)	Per hektar	Rp 120.000,00
	5. Pembuatan Peta Garis Skala 1 : 2.500 (minimal 100 hektar)	Per hektar	Rp 100.000,00
<b>II.</b>	<b>PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH</b>		
	A. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali		
	1. Pelayanan Pendaftaran Penegasan, Konversi atau Pengakuan Hak	Per bidang	Rp 50.000,00
	2. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk:		
	a. Perorangan	Per bidang	Rp 50.000,00
	b. Badan Hukum	Per bidang	Rp 100.000,00
	3. Pelayanan Pendaftaran Keputusan perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan	Per bidang	Rp 50.000,00
	4. Pelayanan Pendaftaran Keputusan pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan	Per bidang	Rp 50.000,00
	5. Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun		
	a. Bersubsidi (berdasarkan penetapan Kementerian Negara Perumahan Rakyat)	Per unit	Rp 50.000,00

b. Non subsidi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Non Subsidi	Per unit	Rp 100.000,00
6.	Pelayanan Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, dan Ruang Perairan	Per bidang	Rp 50.000,00
7.	Pendaftaran Perubahan Hak:		
	a. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi Hak Milik	Per bidang	Rp 50.000,00
	b. Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan	Per bidang	Rp 50.000,00
	c. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai	Per bidang	Rp 50.000,00
	d. Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai	Per bidang	Rp 50.000,00
B.	Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah		
1.	Pelayanan pendaftaran pemindahan/ peralihan Hak Atas Tanah untuk Instansi Pemerintah dan badan hukum keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, Panti Asuhan dan Panti Jompo	Per bidang	Rp 50.000,00
2.	Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Per orang	Rp 50.000,00
3.	Pemindahan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Per orang	Rp 50.000,00
4.	Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Milik	Per bidang	Rp 50.000,00
5.	Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan [Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)] dengan Nilai Hak Tanggungan:		
	a. sampai dengan Rp250 juta	Per bidang	Rp 50.000,00
	b. di atas Rp250 juta sampai dengan Rp1 Milyar	Per bidang	Rp 200.000,00

c. di atas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. di atas Rp1 Milyar sampai dengan Rp10 Milyar	Per bidang	Rp 2.500.000,00
	d. di atas Rp10 Milyar sampai dengan Rp1 Trilyun	Per bidang	Rp 25.000.000,00
	e. di atas Rp1 Trilyun	Per bidang	Rp 50.000.000,00
	6. Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan ( <i>Cessie, Subrogasi, Merger</i> )	Per bidang	Rp 50.000,00
	7. Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak atas Tanah dan Hak Milik Satuan Rumah Susun karena Pelepasan Hak	Per bidang	Rp 50.000,00
	8. Pelayanan Pendaftaran Pembagian Hak Bersama (tanpa ada pemecahan/pemisahan maupun memerlukan pemecahan/ pemisahan)	Per bidang	Rp 50.000,00
	9. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Data Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan	Per bidang	Rp 50.000,00
	10. Pelayanan Pendaftaran Pemisahan, Pemecahan, dan Penggabungan	Per bidang	Rp 50.000,00
	11. Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan/Roya (termasuk roya parsial yang memerlukan pemisahan atau tidak)	Per bidang	Rp 50.000,00
	12. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Nama	Per bidang	Rp 50.000,00
	13. Pelayanan Penggantian Blanko Sertifikat (karena hilang/rusak atau penggantian blanko sertifikat model lama ke model baru)	Per bidang	Rp 50.000,00
	14. Pelayanan Pencatatan Pemblokiran	Per bidang	Rp 50.000,00
	15. Pelayanan Pencatatan Lain sesuai ketentuan yang berlaku.	Per bidang	Rp 50.000,00
<b>III.</b>	<b>PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN</b>		
	A. Pelayanan Informasi Titik Koordinat	Per titik	Rp 50.000,00

B. Pelayanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	B. Pelayanan Data <i>Global Navigation Satellite System</i> (GNSS)/ <i>Continuously Operating Reference Stations</i> (CORS)		
	1. Paket data harian	Per pengguna/ hari	Rp 50.000,00
	2. Paket data bulanan	Per pengguna/ bulan	Rp 1.250.000,00
	3. Paket data tahunan	Per pengguna/ tahun	Rp 13.750.000,00
	C. Pelayanan Peta Pertanahan dalam format multimedia dan format raster lainnya		
	1. Peta sampai dengan Skala 1:5.000 (minimal 25 hektar)	Per hektar/ tema	Rp 4.000,00
	2. Peta dari Skala 1:10.000 sampai dengan 1:50.000 (minimal 4.000 hektar)	Per hektar/ tema	Rp 100,00
	D. Pelayanan Informasi Nilai Tanah atau Kawasan		
	1. Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti	Per bidang	Rp 50.000,00
	2. Zonasi Nilai Tanah (minimum 50 hektar)	Per hektar	Rp 1.000,00
	3. Nilai Ekonomi Kawasan (minimum 50 hektar)	Per hektar	Rp 1.000,00
	4. Nilai Aset Kawasan (minimum 50 hektar)	Per hektar	Rp 1.000,00
	E. Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah (Analisis Penggunaan Tanah, Ketersediaan Tanah, dan peta-peta lainnya)		
	1. Hitam putih		
	a. Format A4	Per lembar/ wilayah	Rp 25.000,00
	b. Format A3	Per lembar/ wilayah	Rp 40.000,00
	c. Format A2	Per lembar/ wilayah	Rp 55.000,00

d. Format A1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Format A1	Per lembar/ wilayah	Rp 75.000,00
	e. Format A0	Per lembar/ wilayah	Rp 100.000,00
	2. Kertas Berwarna		
	a. Format A4	Per lembar/ wilayah	Rp 75.000,00
	b. Format A3	Per lembar/ wilayah	Rp 90.000,00
	c. Format A2	Per lembar/ wilayah	Rp 110.000,00
	d. Format A1	Per lembar/ wilayah	Rp 135.000,00
	e. Format A0	Per lembar/ wilayah	Rp 175.000,00
	3. Digital dalam format multimedia		
	a. Skala sama dengan atau lebih besar dari 1 : 10.000	Per tema/ wilayah	Rp 350.000,00
	b. Skala lebih kecil dari 1 : 10.000 sampai dengan 1 : 50.000	Per tema/ wilayah	Rp 300.000,00
	c. Skala lebih kecil dari 1 : 50.000 sampai dengan 1 : 100.000	Per tema/ wilayah	Rp 275.000,00
	d. Skala lebih kecil dari 1 : 100.000	Per tema/ wilayah	Rp 250.000,00
	F. Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal		
	1. Pengecekan Sertifikat	Per sertifikat	Rp 50.000,00
	2. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)	Per SKPT	Rp 50.000,00
	3. Informasi Tekstual/Grafikal untuk Surveyor Berlisensi	Per bidang	Rp 50.000,00

IV. PELAYANAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
IV.	<b>PELAYANAN LISENSI</b>		
	A. Penilai Tanah	Per orang/ usaha jasa penilaian	Rp 250.000,00
	B. Surveyor Berlisensi	Per orang/ usaha jasa perorangan	Rp 250.000,00
	C. Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Per orang	Rp 250.000,00
V.	<b>PELAYANAN PENDIDIKAN</b>		
	A. Program Pendidikan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral untuk mahasiswa tahun akademik 2009/2010		
	1. Penyelenggaraan Pendidikan :		
	a. Biaya Kuliah		
	1) Kuliah/Teori	Per satuan kredit semester	Rp 20.000,00
	2) Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 30.000,00
	b. Biaya Penunjang Pendidikan	Per satuan kredit semester	Rp 50.000,00
	c. Biaya Ujian	Per satuan kredit semester	Rp 8.500,00
	d. Biaya Wisuda	Per orang	Rp 250.000,00
	e. Biaya Pengelolaan	Per satuan kredit semester	Rp 12.500,00
B. Program Pendidikan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral			
1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00	

2. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per satuan kredit semester	Rp 30.000,00
	2) Praktek	Per satuan kredit semester	Rp 40.000,00
	3) Teori dan Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 70.000,00
	b. Uj ian	Per satuan kredit semester	Rp 25.000,00
	3. Wisuda	Per orang	Rp 300.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/ paket	Rp 7.000.000,00
	C. Program Pendidikan Diploma IV/Strata-1 Pertanahan		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per satuan kredit semester	Rp 40.000,00
	2) Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 60.000,00
	3) Teori dan Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 100.000,00
	b. Uj ian	Per satuan kredit semester	Rp 60.000,00
	3. Wisuda	Per orang	Rp 500.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/ tahun	Rp 6.000.000,00

D. Pendidikan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	D. Pendidikan Ketrampilan Pertanahan untuk Masyarakat (Non Institusional)		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan :		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per jam pelajaran	Rp 30.000,00
	2) Teori dan Praktik	Per jam pelajaran	Rp 50.000,00
	b. Ujian	Per jam pelajaran	Rp 8.500,00
	3. Pelantikan	Per orang	Rp 250.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/ paket	Rp 700.000,00
	E. Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per satuan kredit kwartal	Rp 60.000,00
	2) Teori dan Praktik	Per satuan kredit kwartal	Rp 90.000,00
	b. Ujian	Per satuan kredit kwartal	Rp 50.000,00
	3. Wisuda	Per orang	Rp 500.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/ paket	Rp 2.000.000,00
	F. Program Pendidikan Spesialis-1 Pertanahan		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per satuan kredit triwulan	Rp 60.000,00

2) Praktik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Praktik	Per satuan kredit triwulan	Rp 90.000,00
	3) Teori dan Praktik	Per satuan kredit triwulan	Rp 150.000,00
	b. Ujian	Per satuan kredit triwulan	Rp 75.000,00
	3. Wisuda	Per orang	Rp 500.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/ paket	Rp 5.000.000,00
	G. Program Pendidikan Magister (Strata-2) Pertanahan		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	Per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	Per satuan kredit semester	Rp 60.000,00
	2) Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 90.000,00
	3) Teori dan Praktik	Per satuan kredit semester	Rp 150.000,00
	b. Ujian	Per satuan kredit semester	Rp 75.000,00
	3. Wisuda	Per orang	Rp 500.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	Per orang/ paket	Rp 10.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,



SEPTI SAPTO NUGROHO